

## **POLITIK IDENTITAS DAN KRISIS IDENTITAS: MENGUNGKAP REALITAS PRAKTEK POLITIK DI INDONESIA**

Oleh

**Toguan Rambe**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Email: toguan@iain-padangsidempuan.ac.id

**Seva Mayasari**

Dosen Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara

Email: mayaseva15@gmail.com

### **Abstrac**

*This paper is the result of research with the argument that the Indonesian nation as a nation state does not justify the polarization of political identity based on ethnicity or religion. The fact that identity politics often occurs is based on certain political interests and for the interests of a group or group in gaining legitimacy of power. This condition causes prolonged social conflict and does not contribute to the development of social solidarity and the development of a nation. While this type of research is descriptive-analytic in the form of narratives presented with accurate data, data collection through library research, the author provides a comprehensive analysis of various written literature and those sourced from print and electronic media. The direction of this paper seeks to portray the nuances of identity politics that occur in Indonesia, how identity politics is played by political actors and what are the implications for the identity of the Indonesian nation. The results of this study indicate that identity politics has a negative impact on Pancasila values and social norms that have become the characteristics of the Indonesian nation. Identity politics also has implications for the identity crisis, among others, disrupting the integrity of the unitary state of the Republic of Indonesia, the increasing prevalence of hoax news, the occurrence of propaganda politics for unilateral interests, disturbing the plurality of the nation and the occurrence of social conflicts.*

**Kata Kunci;** politik, identitas, krisis, dan Indonesia.

### **A. Pendahuluan**

Realitas politik identitas seringkali muncul dalam pentas politik di Indonesia, munculnya politik identitas itu memiliki sejarah yang begitu panjang, sudah menjadi catatan sejarah bahwa Indonesia merupakan negara yang mengitari wilayah jalur sutra, kehidupan pluralistik menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri menjadi entitas negara ini, keberagaman bisa saja dari dalam maupun berasal dari luar. John Sydenham Furnivall termasuk orang yang pertama kali menyebut Indonesia masuk ke



dalam kategori masyarakat majemuk (*plural society*). Masyarakat majemuk menurutnya adalah suatu masyarakat dimana sistem nilai yang dianut berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya membuat mereka kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain.

Seringkali dalam masyarakat heterogeny terjadi dominasi etnis atau suku tertentu misalkan di Indonesia etnis Tionghoa salah satu etnis yang cukup mendominasi. Dalam catatan sejarahnya etnis ini sampai ke wilayah nusantara ini pada abad 206 SM-220 Masehi melalui jalur perdagangan. Kedatangan bangsa Tionghoa bersamaan dengan ekspedisi yang dilakukan oleh laksamana Cheng Ho sebanyak tujuh kali. Terbentuknya politik identitas itu sendiri paling tidak disebabkan oleh dua faktor secara parsial dan interaksial. Kedua faktor tersebut melahirkan perubahan yang begitu besar bagi tatanan kehidupan bagi sebuah negara, dapat terlihat pada perubahan sosial ekonomi, sosial politik bahkan budaya politik. Realitas sosial politik di Indonesia seringkali dihadapkan antara identitas etnis dan agama, meskipun hal ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan sosial, dalam proses terjadinya politik identitas dari aspek agama akan memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perubahan sosial begitupun sebaliknya.

Negara yang berdaulat tentunya memerlukan identitas nasional maupun jati diri bangsa yang fungsi utamanya bukan hanya sebagai pembeda akan tetapi lebih jauh sebagai ideologi penggerak kemajuan suatu bangsa. Bahkan satu negara disebut sebagai bangsa yang berdaulat apabila telah memiliki satu identitas nasional dan senantiasa menjaga dan merawat identitas tersebut dalam proses perjalanan bangsa itu. Bahkan negeri luar juga akan mengakui kedaulatan suatu bangsa dengan adanya identitas nasional. Penentuan identitas nasional tentunya harus secara universal tidak berpihak kepada salah satu entitas agama maupun budaya, mengingat kenyataan masyarakat Indonesia sangatlah beragama dari berbagai elemen. Identitas yang ditetapkan di negara yang dikenal dengan keberagaman ini mestinya dengan sudut pandang yang dinamis bukan melalui perspektif statis, sehingga ruang gerak dari masing identitas masyarakat itu saling berkembang dan pada gilirannya selaras dengan cita-cita kemajuan bangsa Indonesia. Kan Identitas nasional secara normatif bukan hanya terdapat pada UUD 1945 akan tetapi juga termaktub dalam Undang-Undang



Nomor 24 tahun 2009, harus lebih mendalam melalui filosofis yang menjadi pembeda negara Indonesia dan negara lainnya.<sup>1</sup>

Konsep *nation state* sebagai dasar tidak dibenarkannya polarisasi politik baik berdasarkan identitas agama maupun budaya, politik identitas yang didasarkan kepada kepentingan identitas tertentu tidak jarang menjadi sumber utama terjadinya konflik politik, ketegangan itu lebih terlihat lagi pada kelompok yang superior dan inferior atau bahkan dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas. Realitas di Indonesia misalnya pemaknaan terhadap demokrasi liberal yang memberikan posisi istimewa terhadap Pancasila akan tetapi pada sisi lain menganggap agama sebagai sebuah ancaman terutama pada agama-agama minoritas, padahal seharusnya saling memberikan nilai-nilai positif lebih sering dikenal dengan *simbiosis mutualisme*. Hal lain yang dapat dipetik dari politik identitas yakni adanya dorongan untuk menjaga karakteristik tertentu, melesterikan semangat kolektif sebagai jati diri seseorang, sehingga keberadaan budaya tertentu tidak akan luntur dan hilang. Realitas politik di Indonesia dalam kehidupan masyarakatnya yang heterogen makan identitas nasional, etnis justru sering memainkan peran yang begitu penting.

Seharusnya politik identitas tersebut dapat dilebur menjadi politik kebangsaan, kebiasaan politik yang menghilangkan ego sektoral, mengedepankan kepentingan bangsa dan masyarakat. Politik kenegaraan dan nasionalisme berlandaskan Pancasila merupakan cara mengejawantahkan politik kebhinnekaan dengan tujuan akhir untuk kesatuan dan kemajuan. Pada sisi lain tentunya dibutuhkan kesepakatan menghilangkan sekat-sekat perbedaan. Yang terjadi di era politik kontemporer, substannya politik identitas itu justru dapat mengancam nasionalisme dan menentang pluralitas yang sejak lama ada. Pada tulisan ini berusaha memotret bagaimana nuansa politik identitas yang terjadi di Indonesia, apa pentingnya bagi para aktor-aktor politik dan memainkan politik identitas tersebut dan juga yang perlu dilihat yakni apakah politik identitas itu justru akan menyebabkan krisis identitas ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

## **B. Novelty Atau Kebaruan**

Artikel yang membahas yang berkaitan dengan politik identitas cukup banyak, salah satunya adalah artikel Fikri yang berjudul *Politik Identitas dan Penguatan Demokrasi Lokal ; Kekuatan Wong Kito dalam Demokrasi Lokal. Jurnal Kebudayaan*



dan Sastra Islam diselesaikan pada tahun 2017. Namun, dari sekian banyak artikel yang membahas tentang politik identitas ini belum ada yang mengulas tentang politik identitas secara khusus. Inilah yang menjadi novelty atau kebaruan dalam tulisan ini. Penulis mengulas politik identitas secara khusus.

### C. Metode Penelitian

Tullisan ini merupakan penelitian deskriptif dalam aplikasinya memakai pendekatan kualitatif. tulisan ini disajikan dalam bentuk deskripsi, langkah-langkah yang digunakan dimulai dengan menganalisa problem politik identitas yang terjadi di Indonesia, isu-isu yang kerap kali muncul antara nasionalisme dengan agama atau relegiusitas. Karena itu jenis penelitian ini bersifat analisis-deskriptif berupa narasi yang disajikan dengan data yang akurat, adapun metode pengumpulan data melalui *library research*. Posisinya studi kepustakaan disebut juga dengan survey literatur, karena obyek yang diteliti dan dipelajari keseluruhannya bahan-bahan yang tertulis, buku-buku, artikel e-book, hasil penelitian, jurnal ilmiah yang dipublikasi maupun bersumber dari media cetak atau elektronik yang diperoleh penulis dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas ilmiahnya. Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka keseluruhan data yang relevan mendukung obyek penelitian ini akan diinventarisir dan dianalisa dengan menggunakan kaidah ilmiah, baik yang bersumber dari data primer atau sekunder akan digunakan dan disajikan secara deskriptif dan obyektif, kemudian dirumuskan hasil analisa dalam bentuk kesimpulan.

### D. Pendahuluan

Lukmanoro menyampaikan bahwa politik identitas itu untuk mengedepankan berbagai macam kepentingan dari suatu kelompok-kelompok tertentu karena ditemukannya kesamaan identitas maupun karakteristik, baik ditemukannya pada etnisitas, budaya, gender atau agama. Pragmatism dari politik identitas itu sendiri bagian dari rumusan politik perbedaan. Para aktor-aktor politik melakukan tindakan politisasi untuk mempengaruhi bukannya merubahan kebijakan yang sudah ada, melakukan hegemoni serta penguasaan terhadap nilai-nilai yang sudah establish hingga terkadang bertindak anarki untuk kepentingan pragmatisme politik. Adapun Donald L Morowitz sebagai pakar ilmu politik dari Duke Universitas memberikan



pengertian bahwa politik identitas sebagai garis pembatas dalam menetapkan siapa yang diterima dan siapa yang ditolak, keberadaan garis pembatas tersebut akan selalu tampak dan tidak akan berubah. Dengan tegasnya pembeda yang sengaja dirumuskan maka anggota yang termasuk pada identitas kelompok tertentu akan bersifat permanen. Sementara para ilmuwan lain juga memberikan penafsiran dengan menggunakan logika dan lebih operasional. Agnes Haller misalkan, lebih cenderung menggunakan gerakan politik dalam mendepenisikan politik identitas itu, bahkan dia mengkategorikan politik identitas ini sebagai gerakan politik yang utama. Lebih rinci Agnes Heller menggambarkan politik identitas sebagai gerakan politik yang agenda utamanya pada pembedaan, memberikan kebebasan, meskipun pada akhirnya muncul polarisasi intoleransi, bahkan ketegangan antar golongan, lebih lanjut Heller mengatakan gerakan politik identitas mencakup rasisme, dan perselisihan etnis.

Kondisi di Indonesia, Syafii Ma'arif juga memberikan pandangan sebagaimana yang telah tertuang pada bukunya berjudul *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*, secara khusus menginventarisir kondisi perpolitikan di Indonesia, realitas politik identitasnya lebih erat dengan etnisitas, agama, ideologi serta kepentingan-kepentingan lokal yang umumnya dimotori oleh elit-elit partai politik dengan mengaktualisasikan diri mereka masing-masing.<sup>2</sup> Pada gerakan politik identitas ini isu-isu keadilan, kesetaraan menjadi isu sentral perjuangannya bahkan gerakan otonomi pada suatu daerah juga dapat dipandang sebagai perwujudan dari politik identitas. Sehingga dalam perkembangannya banyak dari kelompok-kelompok elit politik untuk berkuasa dan tampil sebagai pemimpin, politik identitas itu justru dikooptasi dan dipergunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melanggangkan kekuasaan politik. Politik identitas digunakan untuk meraih kemenangan politik justru akan mendorong pertikaian atau konflik dengan identitas yang lain dan kondisi seperti selalu mendapatkan kritikan yang pada masyarakat yang demokratis. Dengan begitu, politik identitas dapat digambarkan seakan-akan meneguhkan kesatuan yang bersifat holistik dan esensial menyangkut keberadaan suatu kelompok tertentu.

Karakteristik gerakan politik identitas juga memiliki ciri yang berbeda, sebagaimana Klaus Von Beyme telah merumuskan ke dalam tiga tahap perkembangan politik identitas. *Pertama*. tahap pramodern yang mengakibatkan terjadinya konflik secara fundamental, terbentuknya gerakan sosial secara berkemlompok dan menyebar secara luas, terjadinya mobilisasi ideologi dari para elit politik, persaingan tersebut



semakin kentara terlihat pada kontestasi memperebutkan kekuasaan pada masa transisi kekuasaan politik. *Kedua*, tahapan modern, jenis gerakan ini muncul bermula dengan melihat kondisi dan situasional, pertimbangannya melihat pada sumber-sumber untuk dimobilisasi, kerangka aplikasinya memiliki kedekatan emosional dengan pemimpin sebagai aktor-aktor yang berkuasa serta partisipasi dari lapisan bawah yang pada gilirannya punya tujuan mendapatkan pembagian kewenangan atau kuasa. *Ketiga*, Perkembangan postmodern, gerakan ini muncul dalam masyarakat bermula dari dinamikanya secara alamiah, protes terhadap kebijakan publik muncul atas kesadaran individual bahkan tidak ada lagi satu kelompok yang mendominasi. Model aksi yang diperankan berdasarkan kompetensi yang bersifat otonom serta tercapai tujuan. Realitas negara yang dihuni dari berbagai latar belakang identitas dan etnisitas, gerakan politik tumbuh dengan subur pada kesempatan yang sama munculnya kelompok-kelompok lain menampilkan perjuangan mereka dan mengatur strategi agar tetap bertahan dalam dinamika sosial politik yang dinamis. Politik identitas juga bagian dari konstrukri sosial yang memberikan peranan penting dalam ikatan suatu kelompok politik semntara *political of identity* justru mengacu pada sistem dan metode para elit politik dalam mengorganisasikan sebuah identitas sebagai sara politik.

Dengan demikian secara global teori tentang politik identitas dari berbagai pendapat yang disampaikan para ahli serta analisa terhadap teori tersebut dapat dikategorisasikan faktor yang menjadikan politik identitas selalu muncul dan dipraktekkan dalam pentas politik. Identitas agama maupun etnis selalu faktor yang dikedepankan, pilihan isu identitas tersebut menjadi hal yang paling sering diperbincangkan dalam kontetasi politik di Indonesia untuk dipertaruhkan. Pembelaan terhadap identitas tertentu menjadi variabel penting dalam perhelatan politik di tanah air hal ini disebabkan para elit politik berjuang secara berhadap-hadapan apalagi jika diberbagai pihak tidak ditemukan faktor yang dominan, pada kondisi yang demikian untuk meraih kuasa dalam politik seringkali berbagai cara dilakukan oleh para elit politi dalm hak ini variabel identitas menjadi penting untuk diorasikan bahkan dalam sejarahnya politik identitas yang dijadikan sebagaia isu politik selalu diskursus politik yang tidak pernah selesai diperbincangkan.

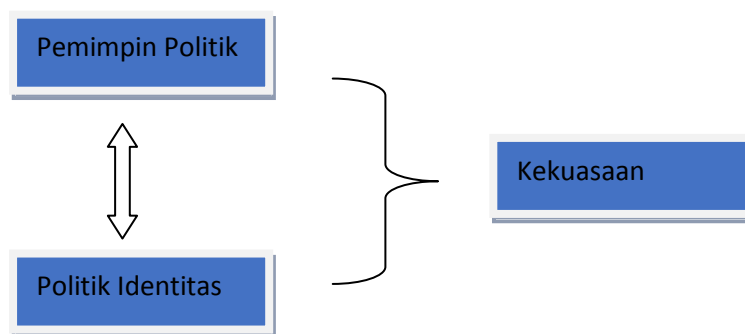
## **E. Politik Identitas di Indonesia**



Isu politik identitas di Indonesia seringkali membenturkan antara kelompok identitas nasionalisme dan kelompok identitas agama. Persoalan yang dikedepankan dalam perwakilan dua kelompok ini adalah klaim kebenaran dan keunggulan dalam kontestasi politik bahkan sampai pada basis pendukung ditengah-tengah masyarakat. Kenyataan di Indonesia identitas politik hanyalah digunakan sebagai latar propaganda kekuasaan, dengan cara mengulas kembali faktor historis bagaimana sejarah yang begitu panjang mengenai kemerdekaan yang diraih Indonesia dari gempuran penjajah, hingga perumusan ideologi perjalanan bang hingga saat ini, jika ditelusuri lebih dalam nilai-nilai agama memang memberikan dampak yang sangat berarti dalam perumusan dasar-dasar negeri Indonesia, bahkan pancasila sebagai ideologi bangsa juga mengandung nilai-nilai agama yang agung. Meskipun pancasila telah menjadi konsensus sebagai landasan bernegara, dalam hal meraih kekuasaan politik di negara ini selalu kembali pada masa lampau dengan menjadikan politik identitas sebagai propaganda. Pada dimensi lain sebenarnya di Indonesia posisi agama dengan politik tidaklah dapat dipisahkan. Politik dalam kewenangannya berkeinginan menghasilkan kebijakan publik untuk menciptakan masyarakat harmonis dan damai, pemikiran tersebut tentunya diilhami oleh nilai-nilai agama sejak dari awal kehadirannya untuk kemaslahatan umat secara menyeluruh. Hubungan ini sejatinya mengharuskan sikap dan keyakinan seluruh praktek politik harus berlandas pada nilai-nilai kebenaran agama, politik dalam prinsipnya ingin mengasilkan kebijakan dan hukum dengan tujuan menciptakan rasa berkeadilan ditengah-tengah masyarakat maka agama dapat memberikan pembimbingan kearah tersebut.

Nilai agama terhadap sebaigian besar masyarakat Indonesia menempatkannya pada posisi yang sakral, agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hal kegiatan kenegaraan. Pemisahan antara kedua nilai tersebut disebabkan suburnya paham-paham sekuler dan liberal yang mendukung pemisahan antara agama dengan politik, keberadaan pemikiran tersebut perlahan dapat mengikis paham nasionalisme dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia yang begitu majemuk. Hubungan identitas agama dan politik itu sendiri lebih dikenal terbagai kedalam tiga pembedangan yakni, *Integralistik*, memberikan pernyataan bahwa posisi agama bukan hanya sekedar doktrin agama dengan tujuan membimbing manusia pada aspek spiritual, melainkan posisinya dapat membangun sistem kenegaraan. Kelompok *sekularistik* berpendapat bahwa memberikan pemisahan antara agama dan negara,

pemisahan kedua variabel ini memberikan konsekuensi nilai-nilai agama tidak memberikan pengaruh dalam kegiatan kenegaraan. Kelompok *simbiotik* kelompok ini justru berpedapat kedua hubungan identitas ini saling mempengaruhi dan memerlukan. Gerakan politik identitas tampil dalam dua karakteristik, tahapannya mengalami perkembangannya, dari mulai tahapan pramodern sampai kepada postmodern. Perpecahan yang disebabkan politik identitas ini disebabkan faktor kesukuan yang sangat fanatik memunculkan gerakan sosial politik yang berdampak pada elemen yang lebih luas. Mobilisasi gerakan politik baik secara agenda politik maupun ideologis digerakkan oleh para tokoh atau elit politik dengan tujuan utama dari politik itu sendiri, mendapatkan kekuasaan atau paling tidak dapat bergabung dengan rezim kekuasaan. Tahapan modern, gerakan politik identitas itu muncul melalui komunikasi dan jejaring politik yang kuat, hal ini dibutuhkan variabel-variabel yang mendukung untuk dikonsolidasikan kepada para pemimpin, sehingga tidak adanya kelompok yang mendominasi dan terjadinya pembagian kekuasaan secara berkeadilan. Secara peta konsep terkait model dan agenda politik identitas dapat dijelaskan dalam bagan di bawah ini:



Bagan di atas, menjelaskan tiga variabel ini selalu ditunjukkan dalam kegiatan dalam kontestasi politik di Indonesia, politik memang kontestasi yang tujuan akhirnya adalah kemenangan dan kekuasaan, persoalan maraknya dan pecahnya politik identitas di Indonesia saat ini selalu dimotori para elit politik dengan berbagai kepentingan yang melekat pada kelompok maupun golongan tertentu. Boleh jadi dengan melakukan cara manipulasi politik identitas untuk melanggengkan kekuasaan, antara kelompok nasionalis dan agama selalu dibenturkan dan isu mengenai kedua variabel tersebut menjadi celah untuk mengkritik pemerintah atau kekuasaan tidak berhasil menentramkan kehidupan sosial politik dan budaya masyarakat Indonesia.





Pengamatan terhadap politik identitas itu mestinya secara komprehensif, harus diamati siapa yang memobilisasinya lalu apa kepentingan serta tujuan yang melatarbelakanginya. Politik identitas yang berlebihan atau cenderung anarkis justru akan merusak tatanan masyarakat dan nasionalisme bangsa, isu-isu primordialisme dengan sikap menjebak fanatisme terhadap kelompok-kelompok tertentu, anarkis yang ditimbulkan oleh politik identitas ini semakin diperbesar dengan maraknya berbagai macam informasi di media yang saling menuding dan mendeskridetkan lawan politik. Kenyataan aksi politik pada era global sarat dengan pemberitaan di media digital sebagai instrument penting semua orang. Banyaknya informasi yang tersebar di media digital menjadikan isu tentang politik identitas ini semakin tidak terkendalikan. Politik identitas dengan menggunakan instrument media digital memunculkan persolan yang lain penyebaran berita tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya atau justru informasinya kebohongan atau *hoax*.

Prilaku masyarakat menanggapi berita *hoax*<sup>3</sup> terkait politik identitas yang begitu banyak tersebar diberbagai platform media online maupun cetak tidak melakukan upaya filterisasi maupun melakukan bandingan terhadap informasi lain. Justru seringkali masyarakat mengambil pilahan untuk menyebarluaskan informasi bohong tersebut bahkan menafsirkannya sesuai dengan persepsinya mengakibatkan informasi semakin tidak jelas dan menghiring opini tersebut semakin liar. Bagi bangsa Indonesia harus memastikan nasionalisme begitu penting dan mutlak bagi bangsa dan negara. Berdasarkan catatan sejarah bahwa dorongan nasionalisme inilah yang menghantarkan negara ini merdeka dan terbebas dari negara penjajah kolonialisme dan imperialisme yang menjadikan catatan buruk bagi bangsa ini dengan waktu yang begitu lama, sekitar tiga abad lebih. Semangat nasionalisme yang tinggi pada akhirnya Indonesia terbebas dari kelompok penjajah dan munculnya kesadaran persatuan dan kesatuan bagi rakyat Indonesia. Bagaimana realita keanekaragaman yang terjadi misalkan ras, suku, agama serta bahasa daerah dijadikan sebagai kekayaan Indonesia dan sebagai pemersatu antar berbagai golongan. Nasionalisme yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia ini merupakan sebuah identitas yang tidak boleh dilupakan siapapun. Kemajemukan yang terdapat di Indonesia melahirkan politik identitas bagi setiap golongan tersendiri, kemunculannya disebabkan ingin menampilkan karakter budaya masing-masing, penyebab lain karena bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, praktek korupsi yang membudaya pada bangsa ini sehingga muncul perlawanan politik



yang secara terstruktur membentuk suatu kelompok dan gerakan sosial politik. Pemerintah yang memiliki kewenangan dan kuasa sudah seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap beragamnya politik identitas tersebut bahwa politik identitas yang bersifat lokal dan identitas kewilyahan itu tidak mengganggu semangat nasionalisme masyarakat Indonesia.

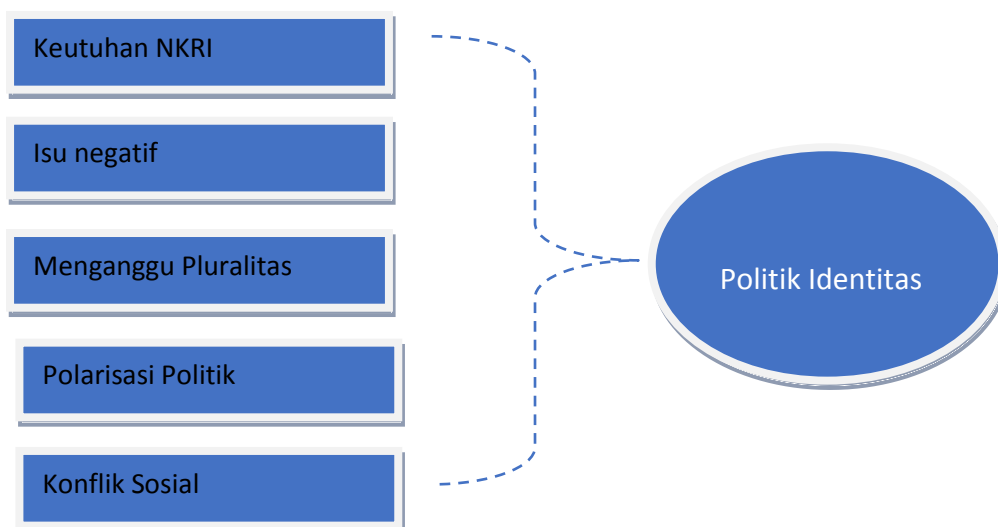
Pada sisi yang lain politik identitas bersifat lokal dan kebudayaan tertentu itu dapat pula meningkatkan semangat nasionalisme pada bangsa Indonesia dengan bentuk politik Identitas yang mengedepankan semangat kebhinnekaan dengan menjunjung persatuan dan kesatuan sosial. Politik identitas serta semangat nasionalisme sebagai jati diri bangsa harus diimbangi dengan sikap berkeadilan dan solidaritas yang kaut. Pilihan sikap berkeadilan dan solidaritas yang tinggi tersebut akan menumbuhkan tatanan masyarakat yang stabil baik sosial, politik dan ekonomi juga menghargai individu-individu yang lain atas dasar persatuan dan sesama warga negara Indonesia. Meskipun seringkali dalam realitasnya permasalahan solidaritas dan berkeadilan ini menjadi isu yang menimbulkan permasalahan di ruang-ruang publik, banyak masyarakat yang berpandangan sempit dan mudah terprovokasi. Maraknya konflik sosial antar kelompok, agama bahkan antar pelajar ini menunjukkan pemaknaan terhadap solidaritas yang belum tuntas. Sikap solidaritas mestinya dimaknai perilaku saling menghargai saling menghormati antar sesama warga negara bahkan memegang teguh norma-norma yang berlaku dimasyarakat serta menjunjung tinggi cita-cita bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesadaran terhadap cita-cita NKRI tersebut secara alamiah akan meghadirkan gerakan kolektif untuk mewujudkan rasa persatuan dan kebersamaan dalam menghadirkan negara yang makmur dan berkeadilan sosial, hal ini tentu sesuai dengan falsafah pancasila sebagai ideologi dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara.

Konflik yang terjadi antara daerah dan golongan yang kerap kali terjadi di wilayah negara Indonesia justru mendistorsi semangat persatuan bangsa dan negara, disepakatinya satu ideologi pancasila yang melahirkan semangat nasionalisme menjadi pondasi penting dalam menata politik identitas. Sebagaimana ideologi diambil dari akar budaya bangsa dan sekumpulan gagasa-gasagan yang terdapat dalam elemen masyarakat sebagai sara sarana mewujudkan masyarakat yang aman dan solidaritas. Solidaritas sosial menjadi kunci utama dalam pembentukan semangat nasionalisme dan politik identitas nasional bangsa. Tentu negara Indonesia tidak boleh terjebak pada

kelompok sosial tertentu yang melahirkan sikap primordialisme yang pada gilirannya fanatisme kedaerahan dan kesukuan dan dapat melunturkan semangat nasionalisme kebangsaan.

## F. Implikasi Politik Identitas

Politik identitas yang begitu fanatik tentu menyebabkan desintegrasi bangsa itu sendiri, problematika kehidupan berbangsa dan benegara disatu sisi karena menampilkan sikap dan identitas yang mendominasi. Apabila sikap tersebut yang ditampilkan kepada publik maka politik identitas itu akan menimbulkan masalah dalam arena politik, baik kegiatan politik yang terjadi pada tingkat nasional maupun lokal. Pengalaman panjang sejarah politik bangsa ini selalu menyertai isu-isu politik identitas menjelang perhelatan dan kontasitasi politik tentu semuanya dilaksanakan untuk kepentingan dan memberi dampak yang negatif kepada lawan politik. Seluruh opini akan disusun demikian baiknya untuk memberikan citra yang buruk kepada figur tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, tentu hal seperti mendapatkan respon dari lawan politik yang menyebabkan isu tersebut menjadi ramai bahkan menjadi konsumsi masyarakat. Dampak yang lebih jauh dan buruk politik identitas yang berlebihan tersebut akan menyebabkan krisis identitas dan kepentingan masyarakat lebih banyak, bangsa dan negara. Berikut akan diuraikan beberapa rumusan penulis melalui fakta sosial politik yang terjadi, mengenai dampak sosial dan krisis identitas penyalahgunaan politik identitas bagi persatuan bangsa dan negara, sesuai pada bagan dibawah ini.





Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebabkan karena maraknya politik identitas itu ditengah-tengah masyarakat, identitas agama sering dijadikan satu identitas seseorang dalam memainkan peran politik, gerakan politik identitas itu justru pernah mempertanyakan ideologi bangsa yang sudah lama disepakati keberadaannya. Pada masyarakat yang heterogen seperti Indonesia interaksi sosial sangat memungkinkan terjadinya *truth claim* bahkan terjadinya benturan kehidupan sosial dengan kepentingan antar berbagai golongan dan kelompok. Politik di Indonesia yang menganut sistem demokrasi dan tidak terlepas dari kecenderungan identitas agama bahkan etnis. Hal ini dapat diamati bagaimana peranaan partai politik di Indonesia dalam meramaikan demokrasi di Indonesia pada pemilu presiden maupun Pilkada, posisinya berbagai partai pengusung dengan berbagai latar belakang ideologi keberataian turut serta memberikan polarisasi identitas etnis bahkan agama yang dijadikan alat politik di Indonesia. Kasus yang lain, misalkan isu pribumi dan non pribumi dalam pentas politik yang kerap kali digunakan, menjadi catatan sejarah bagaimana isu ini menyebabkan kerusuhan dan menelan korban jiwa menjelang runtuhnya orde baru. Isu tersebut dikampanyekan dan melakukan diskriminasi bahkan kekerasan terhadap mereka yang bukan asli Indonesia. Padahal jika dilakukan penelusuran dan masyarakat peduli terhadap literasi akan menemukan rekam jejak pribumi yang tidak hanya melibatkan satu suku atau etnis saja. Ternyata pejuang nasional kemerdekaan itu hadir dari berbagai latar belakang identitas yang beragam.

Politik identitas dapat menyebabkan konflik sosial pada masyarakat Indonesia, sebenarnya konflik sosial itu dapat saja terjadi dimanapun dan dalam waktu yang bagaimanapun. Bisa konflik terjadi karena faktor suku, ideologi bahkan agama. Setiap dari masing-masing individu tentunya memiliki potensi konflik tersebut lalu bagaimana masyarakat merespon dan menstimulus konflik yang terjadi sehingga tidak membahayakan dan mengganggu tatanan sosial. Ragam konflik dan kerusuhan yang terjadi di Indonesia merupakan akumulasi dari kerapuhan rasa kesatuan dan solidaritas masyarakat yang majemuk dalam kewilayahan dan kebudayaan serta kompilasi dari kepentingan kelompok-kelompok tertentu, kepentingan politik dan ekonomi menjadi faktor utama daripada konflik sosial yang terjadi.

Konflik sosial yang terjadi mencapai puncaknya karena pada tingkat kelompok yang berkuasa masih memerlukan kelompok-kelompok pendukung dan masih komitmen untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan. Berbagai macam suku, ras dan



agama yang sudah lama di Indoensia sejatinya sudah terbiasa dengan kehidupan yang damai dan rukun, dan mereka juga tidak memiliki basik utuk ikut serta dalam konflik identitas yang terjadi, akan tetapi dalam perkembangannya semakin masyarakat Indonesia itu sudah memiliki pendidikan yang tinggi ditambah dengan desakan civil society dan reformasi maka masyarakat yang plural tadi mau tidak mau harus dikutsertaan dalam kegiatan politik dan pembangunan sosial yang berkeadilan. Beragamnya latar belakang dan struktur sosial pada msasyarakat Indonesia maka permasalahan tentang hak dan kewajiban manjadi faktor yang selalu muncul dalam konflik sosial dan sifatnya menjadi diskursus yang berkepenjangan dibanyak wilayah Indonesia. Konflik sosial yang terjadi dapat menggunakan simbol agama maupun kesukuan yang seringkali mengakibatkan jatuhnya korban dan menjadi distrupsi sejarah berkepanjangan. Konflik sejenis ini bisa terjadi apabila dalam suatu daerah itu terjadinya ketimpangan sosial, kesejahteraan yang tidak merata dan pola kekuasaan yang otoriter. Hubungan berbagai kelompok-kelompok sosial tersebut apabila tidak harmonis akan mengakibatkan dampak sosial yang lebih luas bahkan tidak akan terwujudnya pembangunan secara merata.

Politik identitas yang terjadi karena keragaman sosio kultural yang dimiliki bangsa ini memiliki intensitas konflik sosial yang lebih massif bila dibandingkan terhadap negara lain yang realitas sosio kulturalnya cenderung bersifat homogen. Konflik sosial karena heterogenitas bangsa ini menyebabkan benturan antar etnis, agama dan golongan tertentu atau sering disebut dengan konflik SARA. Ditambah lagi dengan starata sosial jika tidak ditangani dengan bijaksana akan menimbulkan konflik sosial. Tentunya disisi lain, sosio kultural yang beragam pada bangsa menjadi kekayaan tersendiri, ia merupakan khazanah bangsa Indonesia menjadi pembeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang akan berdampak terhadap keuntungan ekonomi bangsa jika pengelolannya dengan baik.

## **G. Penutup**

Adapun keispmluan dari tulisan ini yakni politik identitas yang terjadi menjadi sebuah kenyataan sosial yang harus selalu direspon agar tidak mengikis nilai-nilai persatuan dan nasionalisme bangsa Indoensia. Konflik politik yang terjadi karena identitas tertentu mengakibatkan dampat yang negatif terhadap nilai-nilai pancasila dan narmo sosial yang sudah menjadi jati diri bangsa ini. Politik identitas yang sering



terjadi di Indonesia hanya semata-mata dipergunakan untuk mencapai kekuasaan dan mendiskriminasi lawan politik baik terhadap golongan tertentu maupun terhadap individu. Proses terjadinya politik identitas paling tidak disebabkan oleh beberapa variabel antara lain pemimpin atau tokoh politik, identitas tertentu yang menjadi obyek dan tujuan akhirnya kekuasaan politik. yang seringkali terjadi misalkan benturan antara kelompok nasionalis dan agama yang selalu menjadi diskursus politik yang terkadang tidak substansial. Politik identitas itu sendiri memberikan dampak yang begitu luas terhadap citra negatif politik bangsa itu sendiri bahkan menyebabkan krisis identitas dan mengganggu stabilitas kepentingan bangsa dan negara. Dampak buruk yang terjadi antara lain mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), semakin massifnya berita-berita bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, propaganda politik, tidak menerima pluralitas bangsa Indonesia bahkan akan terjadi konflik-konflik sosial dan golongan. Seharusnya pada masyarakat Indonesia yang terkenal dengan heteroginitas tidak lagi mempersoalkan identitas-identitas yang berebeda justru harus memandang keragaman identitas tersebut sebagai kekayaan yang dimiliki bangsa ini sehingga harus mewujudkan solidaritas sosial, kesejahteraan, dan keadilan.

---

End Note :

<sup>1</sup>Tatu Afifah, *Identitas Nasional Ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 24 Tahun 2009*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2. 2018, hlm. 188.

<sup>2</sup>AS Maarif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*. Democracy Project: Jakarta. 2012, hlm. 55.

<sup>3</sup>Hendra Gunawan, "Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah" pada Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019, hlm. 108-119.



---

## DAFTAR PUSTAKA

- Buchari, Sri Astuti, *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- D' Enteves, Marizio Passern. *Filsafat Politik Hannah Arendt*, Yogyakarta: Qalam, 2003.
- Harahap, FR. *Politik Identitas Berbasis Agama*. Prosiding Sosiologi Konflik dan Politik Identitas. Yogyakarta, 2014
- Maarif, AS. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*. Democracy Project: Jakarta. 2012.
- Munandar, Aris, *Nasionalisme dan Identitas Komunitas Perbatasan Studi Kasus pada Komunitas Desa Sebunga-Sajingan Besar Kabupaten Sambas Kalimantan Barat*, Depok: FISIP Sosiologi Universitas Indonesia, 2013.
- Suparlan, P. *Hubungan Antar Suku Bangsa*. KIK Press: Jakarta, 2008.
- Sri Astuti Buchari. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014.
- Varsheney, Ashutosh (ed.), *Collective Violence in Indonesia*, London: Lyne Rienner Publishers, 2010.
- Afifah, Tatu. *Identitas Nasional Ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 24 Tahun 2009*". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. 2018.
- Chotimah, Hidayat Chusnul. *Identitas Nasional dan Normalitas Internasional sebagai Pertimbangan politik Indonesia dalam Merespon Saksi dan Jaringan Terorisme Global*. *Jurnal Politica*". Vol. 7. 2016.
- Fikri, M. Sirajudin, Nico Oktario A. "*Politik Identitas dan Penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong Kito dalam Demokrasi Lokal*. *Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*". Vol. 10. 2017.
- Widyawati, *Menguatnya politik identitas di Indonesia, Faktor agama, sosial dan etnis*, *Jurnal Pendidikan*, Volume II Nomor 2 (Oktober) 2022.
- Gunawan, Hendra, "Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah" pada *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019.